

Implementation of Education Quality Planning and Work Productivity in Improving the Performance of Education Department of Sumedang Regency

Paroli

^{1a}Universitas Sebelas April Sumedang

^{1b}paroli.feb@unsap.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun 12, 2023

Revised Aug 20, 2023

Accepted Aug 26, 2023

Keywords:

Implementation of planning, quality of education, work productivity, performance.

ABSTRACT

This study aims to determine the achievement of the implementation of education quality planning and work productivity in improving the performance of the Sumedang Regency Education Office through eight National Education Standards. Based on accreditation data and barriers to achieving National Education Standards for primary and secondary education, Early Childhood Education and Community Education. This research uses descriptive qualitative. Data were obtained from school principals, school supervisors, and the Education Office, and based on purposive sampling of elementary schools in the urban area of Sumedang Regency. Secondary data was obtained from interviews while primary data was obtained from the implementation of eight national education standards. Based on the results of the research, it shows that there are three educational standards that still need attention, namely the standards of educators and educational staff, standards of facilities and infrastructure and graduate competency standards. Obstacles encountered in fulfilling standards at the level of educational units are mainly the standards of educators and education staff, standards of facilities and infrastructure and standards of financing. Thus, not all educational standards have been met by schools. Efforts that need to be made in achieving national education standards are that it is necessary to carry out continuous coaching of schools and school principals. For fulfilling the standards of educators and education staff, facilities and infrastructure standards and financing standards, those who are responsible for fulfilling them are the central government and local governments through education financing policies.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Paroli

Program Studi Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jalan Angrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang 45322.

Email: parole.feb@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang memiliki tujuan dan sasaran yang sangat strategis sebagai pelayanan dasar dalam rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan, Dinas Pendidikan memiliki tujuan dan sasaran berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”. Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya”. Misi RPJMD yang terkait dengan Dinas Pendidikan yaitu memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat. Hambatan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan misi RPJMD yaitu Belum Optimalnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik serta masih minimnya akses, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan.

Dalam mewujudkan kinerjaorganisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang diperlukan suatu strategi untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pendidikan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor

yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu strategi dalam meningkatkan iklim organisasi sangat penting.

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan teknik analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1. Analisa SWOT Terhadap Faktor Eksternal dan Internal

<p style="text-align: right;">Eksternal</p> <p style="text-align: left;">Internal</p>	<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan per-undangan (UU, PP, Perpres, Permen, Perda, Perbup) 2. Adanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Sumedang dalam urusan peningkatan dan pengembangan kualitas. 3. Semakin berkembangnya infrastruktur yang dapat mempermudah akses layanan pendidikan. 4. Adanya peluang pemanfaatan teknologi informatika dalam menunjang pelayanan urusan pendidikan. 5. Peraturan perundang-undangan yang mendukung 	<p>Tantangan (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif. 2. Belum optimalnya peran stakeholder bidang pendidikan di daerah; 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; 4. Belum ada antisipasi secara terprogram terhadap fenomena bonus demografi yang dapat menghasilkan fenomena <i>middle trap income</i>.
<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi. 2. Adanya SOTK yang mendukung penyelenggaraan urusan pendidikan. 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi; 2. Memanfaatkan potensi SDM untuk mengembangkan profesionalisme dengan memanfaatkan teknologi IT. 	<p>Alternatif Strategi (S-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan; 2. Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pendidikan; 3. Memotivasi masyarakat untuk lebih berperan dalam bidang pendidikan; 4. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar; 5. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar.
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif; 2. Belum meratanya standar operasional prosedur; 3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana masih belum merata; 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan paket A-B-C; 5. Kurangnya kompetensi dan sikap profesional aparaturnya; 	<p>Alternatif Strategi (W-O);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan pembangunan asrama, melalui komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan; 2. Optimalisasi penataan dan pemerataan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pelayanan pendidikan dasar; 3. Menyusun SOP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 4. Meningkatkan kesejahteraan guru dengan berpedoman pada komitmen pemerintah daerah; 	<p>Alternatif Strategi (W-T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan harmonisasi dengan <i>stake holder</i> bidang pendidikan; 2. Meningkatkan komitmen aparaturnya perundang-undangan.

6. Masih kurangnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;	5. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tendik melalui pendidikan berbasis ITE;	
7. Masih perlu ditingkatkan sarana prasarana pendukung kinerja organisasi;	6. Penambahan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta melakukan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik;	
8. Masih rendahnya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.	7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.	
	8. Meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD Dikmas;	
	9. Meningkatkan sarana dan prasarana PAUD Dikmas;	

Berdasarkan hasil observasi bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis yaitu:

Tabel 2 Permasalahan, Akar Masalah dan Isu Strategis

No	Permasalahan	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Permasalahan pelayanan Pendidikan SD	Hasil sintesis dari identifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis : 1. Akses ke fasilitas pendidikan masih sulit karena tidak seimbang sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Dasar dengan penduduk usia SD dan belum seimbang penataan dan pemerataan guru sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan pendidikan SD/Kesiswaan/Penerapan kurikulum 2013	Masih belum optimalnya Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Sumedang
2	Permasalahan pelayanan Pendidikan SMP	Hasil sistesis dari identifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis: 1. Akses ke fasilitas pendidikan masih sulit karena tidak seimbang sebaran fasilitas pendidikan SMP dengan penduduk usia SMP dan belum seimbang penataan dan pemerataan guru sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Masih lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan pelayanan pendidikan SMP (Tenaga Pendidik-Kesiswaan-Penerapan Kurikulum 2013).	
3	Permasalahan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	Hasil sistesis dari identifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis: 1. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Paket A-B-C 2. Belum adanya insentif terhadap tenaga kependidikan PAUD Dikmas. 3. Kualifikasi dan kompetensi dan kreatifitas dan tenaga kependidikan masih belum optimal.	
4	Permasalahan pelayanan sarana prasarana pelayanan pendidikan	Hasil sistesis dan identifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis sebagai berikut: 1. Belum optimalnya kualitas gedung sekolah, masih kurangnya ruang kelas dan belum lengkapnya fasilitas IT dalam mendukung KBM	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, secara singkat isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan pendidikan yaitu masih belum optimalnya pelayanan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan mengangkat penelitian tentang Implementasi Perencanaan Kualitas Pendidikan dan Produktivitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

1. Sub section 1

Kajian ini difokuskan pada Analisis Implementasi Perencanaan Kualitas Pendidikan dan Produktivitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan dan Produktivitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam bentuk penyusunan dan pengukuran beban kerja sumber daya aparatur melalui pengumpulan data yang diperoleh dari hasil kajian.

2. Sub section 2

Desain sistem dalam penjaminan mutu pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017) menjelaskan :

- 1) Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. Sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan;
 - b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan;
 - c. Sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.
- 2) Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:
 - a. Penetapan standar sebagai landasan dimana standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi;
 - b. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
 - c. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - d. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran;
 - e. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.
- 3) Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas:
 - a. Pemetaan mutu satuan pendidikan berdasar nasional pendidikan;
 - b. Perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis;
 - c. Fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan;
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;
 - e. Penetapan dan evaluasi standar nasional pendidikan;
 - f. Pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 dijelaskan bahwa, Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan, diukur dengan indikator :
 - a. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap;
 - b. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan;
 - c. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan.
2. Standar isi, diukur dengan indikator:
 - a. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan;
 - b. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai prosedur;
 - c. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan.
3. Standar Proses, diukur dengan indikator:
 - a. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan;
 - b. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat;
 - c. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran.
4. Standar penilaian Pendidikan, diukur dengan indikator:
 - a. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi;
 - b. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel;
 - c. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti;
 - d. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek;
 - e. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur.
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, diukur dengan indikator:

- a. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan;
 - b. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai keperluan;
 - c. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan;
 - d. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan.
6. Standar Pengelolaan, diukur dengan indikator:
- a. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan;
 - b. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan;
 - c. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan;
 - d. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen.
7. Standar Sarana dan Prasarana
- a. Kapasitas daya tampung sekolah memadai;
 - b. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak;
 - c. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak.
8. Standar Pembiayaan
- a. Sekolah memberikan layanan subsidi silang
 - b. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan
 - c. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik.

Dalam mengukur produktivitas kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Edy Sutrisno (2017:104) menjelaskan bahwa, produktivitas kerja diukur dengan:

- 1) Kemampuan, diukur dengan indikator:
 - a. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas,
 - b. Keterampilan yang dimiliki.
- 2) Meningkatkan hasil yang dicapai, diukur dengan indikator:
 - a. bekerja lebih keras dari hari kemarin,
 - b. upaya bekerja dengan efektif.
- 3) Semangat kerja diukur dengan indikator:
 - a. upaya meningkatkan kualitas diri;
 - b. bekerja untuk *reward* kerja.
- 4) Pengembangan diri diukur dengan indikator:
 - a. menerima kritikan dari atasan maupun rekan kerja,
 - b. Tantangan dan rintangan yang dihadapi.
- 5) Mutu diukur dengan indikator:
 - a. menunjukkan kualitas diri;
 - b. upaya untuk lebih baik dari yang lain.
- 6) Efisiensi diukur dengan indikator:
 - a. Tolak ukur hasil yang dicapai dengan sumber daya yang ada,
 - b. Menggunakan sumber daya manusia semaksimal mungkin.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara penilaian kinerja diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu :

- 1) Orientasi pelayanan, yang diukur dengan indikator:
 1. Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar;
 2. Memahami pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan;
 3. Memberikan pelayanan sesuai standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan;
 4. Memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan;
 5. Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah;
 6. Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani;
 7. Mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani
- 2) Komitmen diukur dengan indikator:
 1. Memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi;
 2. Menunjukkan perilaku atau tindakan sesuai dengan aturan atau nilai-nilai organisasi sebatas mengikuti arahan atasan;
 3. Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi;
 4. Mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten;

5. Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten;
 6. Menunjukkan atas kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi;
 7. Mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar (menjadi model perilaku positif yang terintegrasi).
- 3) Inisiatif kerja diukur dengan indikator:
1. Memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon tugas atau pekerjaan, belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi;
 2. Cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dengan menyusun target, mencari ide baru ataupun menunjukkan keinginan untuk berkontribusi dalam tugas, dan menghadapi permasalahan dengan menghubungi pihak berwenang/atasan;
 3. Dapat bekerja secara mandiri kemauan untuk mencoba hal baru dan membangun jejaring. Mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam menangani permasalahan rutin;
 4. Bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain;
 5. Menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap permasalahan rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan, dan menghargai orang lain;
 6. Merangkan rencana jangka pendek, adaptasi ide untuk meningkatkan kinerja, dan memberikan dukungan terhadap orang lain;
 7. Merancang rencana yang komprehensif, berorientasi jangka panjang, mempertimbangkan kesuksesan anggota organisasi, serta membuat terobosan baru.
- 4) Kerja sama, diukur dengan indikator:
1. Memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama;
 2. Berusaha menunjukkan perilaku kooperatif dan sikap profesional sesuai standar prosedur;
 3. Menunjukkan komitmen atas profesionalitas dan harapan positif terhadap tim/kelompok kecil;
 4. Bersikap transparan dan terbuka serta menghargai anggota kelompoknya;
 5. Berkomitmen terhadap penyelesaian tugas dan memberikan dukungan secara aktif terhadap anggota tim yang lebih besar dan beragam;
 6. Membangun semangat kelompok besar dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas;
 7. Secara aktif menjaga motivasi dan hubungan yang positif dalam organisasi.
- 5) Kepemimpinan diukur dengan indikator:
1. Memahami dan menunjukkan sikap kepedulian, memberikan arahan tugas, serta pertimbangan atas risiko.
 2. Menunjukkan perilaku positif, memberikan bimbingan dan motivasi, serta keberanian mengambil risiko personal;
 3. Bersedia untuk memberikan pengarahan, memotivasi, dan menunjukkan atas perilaku positif dan keberanian dalam mengambil risiko;
 4. Memberikan dukungan terhadap orang lain serta menunjukkan tekad untuk mengambil risiko;
 5. Menunjukkan kepercayaan diri serta sikap yang adil dan profesional dalam segala situasi, serta berseia untuk mengambil resiko;
 6. Menunjukkan kemandirian dan kemampuan menjadi katalisator;
 7. Menjadi teladan dalam kepemimpinan organisasi.

2. METHOD

Untuk memperoleh data perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dilakukan melalui survei. Metode penelitian kualitatif dengan metode survei digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang Implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu populasi dengan memilih sampel secara tepat, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, pengumpulan dokumen dan triangulasi. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, dengan jumlah informan yaitu sebanyak 87 orang responden yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru dan Pejabat Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles and Hubberman yaitu Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

3. RESULTS AND DISCUSSION

1. Results

Penyusunan dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan mempunyai 9 (sembilan) prinsip yaitu: umum, inklusif, memantik inisiatif, dan inovasi, esensial, substantif, relevan, dan universal, selaras holistik, ringkas, serta mutakhir. Terkait dengan hasil penelitian tentang Implementasi Perencanaan Kualitas Pendidikan dan Produktivitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Berkaitan dengan hal itu, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. Perencanaan Kualitas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Dimensi	Indikator	Realitas	Rekomendasi
Standar Isi	1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	Penyusunan Perangkat Pembelajaran perlu menyamakan konsepsi pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan.	Menyusun strategi dan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
	2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan belum menyeluruh disosialisasikan	Sosialisasi Pengembangan Kurikulum kepada seluruh satuan tingkat pendidikan
	3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	Pengawasan pelaksanaan kurikulum belum dilakukan optimal	Dibentuk Tim pengembang kurikulum iteran
Standar Proses	4. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	Proses pembelajaran dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.	Perencanaan proses pembelajaran melihat perkembangan kemajuan teknologi informasi.
	5. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	Penyusunan proses pembelajaran masih belum tepat sasaran	Pengembangan inovasi pembelajaran melalui kurikulum sekolah penggerak.
	6. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	Pemantauan proses perkembangan proses pembelajaran belum dilakukan seluruhnya pada tingkat satuan pendidikan.	Melakukan pengawasan dan penilaian otentik dalam proses pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan.
Standar Kompetensi Lulusan	7. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	Pendidikan karakter perlu dimaksukan dalam pengembangan kurikulum	Penguatan perencanaan kurikulum berbasis akhlak melalui program penumbuhan budi pekerti meliputi nilai moral dan spiritual, nilai kebangsaan dan kebhinekaan, interaksi positif guru dengan peserta didik, merawat diri dan lingkungannya, mengembangkan potensi diri peserta didik, pelibatan orang tua dan masyarakat.
	8. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	Penyusunan standar kompetensi lulusan belum menyentuh perkembangan kondisi perkembangan pendidikan masa kini.	Penyusunan strategi pembelajaran yang dapat menumbuhkan peserta didik menumbuhkan rasa ingin tahu, kemudahan pendidikan profesionalisme guru, penyusunan pedoman kurikulum berbasis kompetensi.
	9. Lulusan memiliki kompetensi pada	Faktor sarana dan prasarana yang masih sangat kurang berdampak	Meningkatkan anggaran fasilitas untuk memenuhi sarana dan

Dimensi	Indikator	Realitas	Rekomendasi
	dimensi keterampilan	pada motivasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilannya.	prasarana pendukung pembelajaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan peserta didik.
Standar Pendidik dan Kependidikan	10. Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	Bimbingan teknis bagi para guru, rekrutment Guru PPPK, program peningkatan kompetensi guru melalui PPG (Pendidikan Profesi Guru) masih sangat terbatas.	Menyusun strategi kemudahan dalam peningkatan pendidikan profesi guru yang dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
	11. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai keperluan	Lima dimensi yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial belum menjadi acuan dalam pengisian jabatan Kepala Sekolah.	Melaksanakan uji kompetensi secara bertahap kepada seluruh calon Kepala Sekolah. Melaksanakan pendidikan dan latihan bagi Kepala Sekolah. Pemerataan seleksi calon kepala sekolah.
	12. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	Kompetensi tenaga administrasi sekolah masih belum memenuhi standar kompetensi.	Melakukan pendataan tenaga administrasi secara berkala. Melakukan analisis kebutuhan tenaga administrasi. Mengadakan seleksi pengadaan tenaga administrasi.
	13. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan.	Tenaga pustakawan dinilai masih sangat sulit. Berdasarkan hasil observasi tenaga pustakawan di tiap-tiap sekolah dasar dan menengah masih sangat kekurangan karena tidak ada kompetensi khusus bagi tenaga pustakawan.	Melakukan pendataan tenaga pustakawan secara berkala, melakukan analisa kebutuhan pustakawan, mengadakan seleksi pendaftaran pustakawan, dan pelatihan pustakawan.
Standar Sarana dan Prasarana	14. Kapasitas daya tampung sekolah memadai	Masih adanya bangunan sekolah SD dan SMP yang perlu dilakukan rehab, memerlukan ruang kelas baru. Belum ditunjangnya fasilitas teknologi informasi dan sapsras yang belum memadai.	Membangun gedung sekolah dan mengangkat guru sesuai dengan kebutuhan. Memberikan bantuan dengan anggaran RKB melalui dana DAK. Memastikan tiap satuan pendidikan memadai. Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang memadai. Menyusun panduan penerimaan peserta didik secara transparan.
	15. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	Masih adanya bangunan sekolah SD dan SMP yang perlu dilakukan rehab, memerlukan ruang kelas baru. Belum ditunjangnya fasilitas teknologi informasi dan sapsras yang belum memadai.	Memastikan data ketersediaan sarana prasarana masuk dalam database dapodik. Menganalisa kebutuhan setiap satuan pendidikan. Menentukan skala prioritas untuk sarana prasarana. Mengajukan bantuan ke Pusat. Mendistribusikan bantuan pengadaan sarana prasarana kepada setiap satuan pendidikan.
	16. Sekolah memiliki sarana dan prasarana	Masih adanya bangunan sekolah SD dan SMP yang perlu dilakukan rehab, memerlukan ruang kelas baru. Belum ditunjangnya fasilitas	Memastikan anggaran pengadaan sarana prasarana masuk dalam prioritas anggaran murni dan anggaran perubahan.

Dimensi	Indikator	Realitas	Rekomendasi
	pembelajaran yang lengkap dan layak	teknologi informasi dan sapras yang belum memadai.	
Standar Pengelolaan	17. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	Penataan dan pemerataan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pelayanan pendidikan dasar dan menengah belum optimal.	Optimalisasi penataan dan pemerataan kualitas kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pelayanan pendidikan dasar.
	18. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	Akuntabilitas kinerja Dinas masih belum mencapai rencana strategis secara objektif.	Menetapkan program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi program pendidikan pada tahun sebelumnya.
	19. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	Lima fungsi kepada sekolah yaitu leader (pemimpin), motivator, supervisor, manajer, dan administrator, belum sepenuhnya melekat pada diri seorang Kepala Sekolah.	Seleksi Kepala Sekolah berprestasi. Apresiasi kepada Kepala Sekolah berkinerja baik. Mengembangkan model sekolah yang memiliki keunggulan.
	20. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	Sarana prasarana pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal	Peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi melalui pendidikan dan latihan.
Standar Pembiayaan	21. Sekolah memberikan layanan subsidi silang	Subsidi silang dinilai lebih realistis untuk menyatukan keunggulan dan keterukaan akses bagi siswa miskin tanpa meninggalkan kualitas.	a) peningkatan potensi sumber daya manusia berkualitas; b) Penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifitan dan pengefisienan penggunaan dana; e) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalis terjadinya permasalahan-permasalahan
	22. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS adalah lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan. Pemberian dana BOS belum tepat sasaran	Membantu sekolah dalam proses pencairan dan pelaporan dana BOS yang di salurkan ke sekolah.
	23. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran.	Melakukan audit dan monitoring pengelolaan dana operasional sekolah.
Standar Penilaian	24. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	Penilaian aspek kompetensi belum mengacu pada Permendikbud No. 23 Tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.	1) membuat kebijakan dan mengadakan pembinaan kepada setiap sekolah untuk melaksanakan aspek penilaian sesuai ranah kompetensi; 2) mengadakan lomba-lomba untuk melihat kompetensi yang dikuasai seperti FLS2N, OSN, gupres, kepres; 3) Menyusun pedoman penilaian untuk digunakan di tingkat

Dimensi	Indikator	Realitas	Rekomendasi
			<p>satuan pendidikan yang meliputi merumuskan tujuan penelitian, mengembangkan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, pelaporan hasil penilaian;</p> <p>4) Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap peserta didik, baik dari segi pemahamannya terhadap materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan (aspek kognitif), maupun dari segi penghayatan (aspek afektif), dan pengamalannya (aspek psikomotor).</p>
	25. Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	Prinsip penilaian pendidikan di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. Prinsip.	Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dalam melakukan teknik penilaian obyektif dan akuntabel yaitu memberikan penguatan dan pengawasan kepada sekolah untuk melakukan teknik penilaian obyektif dan akuntabel.
	26. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	Hasil PK GURU belum dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).	Menindaklanjuti hasil penilaian pendidikan yaitu melakukan perumusan kebijakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang.
	27. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan sekolah untuk menyusun indikator penilaian sesuai dengan aspek; 2. Memberikan dan mengatur kebijakan dalam instrumen penilaian menyesuaikan aspek-aspek penilaian.
	28. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	Penilaian kinerja guru oleh Dinas Pendidikan masih dinilai bias belum sesuai fakta dan data.	<ol style="list-style-type: none"> a) membentuk tim penilai sekolah; b) Melakukan penilaian sekolah; c) Melakukan pengawasan; d) Melakukan pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut.

Sumber: Data hasil penelitian, diolah peneliti tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada tabel 3. dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1) Standar isi tidak terdapat perbedaan dalam menyikapi standar nasional pendidikan, akan tetapi sekolah swasta ada kepentingan yayasan dalam penyusunan kurikulum sehingga perlu diakomodir dalam kurikulum sehingga perlu diakomodir dalam kurikulum yang dikembangkan;
- 2) Standar proses yang dilaksanakan oleh sekolah tidak terdapat perbedaan yang mendasar dan tetap memenuhi standar nasional pendidikan;
- 3) Standar Kompetensi Lulusan yang diterapkan pada sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat perbedaan, dikarenakan ada keentingan sekolah swasta dalam memberikan ciri khusus terhadap lulusannya berupa

kemampuan membawa AL Qur'an membiasakan diri untuk selalu sholat dan memiliki keahlian tertentu bagi siswa yang mengikuti ekstra kurikuler;

- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dimiliki sekolah swasta dan sekolah negeri juga terdapat perbedaan meskipun tidak mendasar, yakni terdapat perbedaan dalam kewenangan kepala sekolah atau pihak yayasan untuk mengangkat dan menghentikan tenaga pendidik dan kependidikan yang dinilai tidak memenuhi standar nasional pendidikan di sekolah sedangkan di sekolah negeri tidak memiliki kewenangan tersebut;
- 5) Standar sarana dan prasarana yang dikelola oleh manajemen sekolah swasta dan sekolah negeri terdapat perbedaan dalam prosedur memperolehnya dimana sekolah swasta dapat meminta bantuan pada pemerintah melalui dana hibah dan juga dapat memperoleh dari pihak yayasannya, sedangkan sekolah negeri hanya bersumber dari dana penerintah;
- 6) Standar pengelolaan yang dilakukan di sekolah swasta lebih memiliki keleluasaan dan tidak adanya intervensi dari pihak pemerintah dalam manajemen berbasis sekolah yang memenuhi BNSP sedangkan sekolah negeri sering terjadi dualisme kepentingan dalam pengelolaan sekolah;
- 7) Standar pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri berdasarkan BNSP tidak terjadi perbedaan, hanya saja sekolah swasta memiliki sumber biaya yang lebih dari sekolah negeri yang hanya terfokus pada dana yang dibantukan oleh pemerintah melalui dana BOS;
- 8) Standar penilaian yang diterapkan di sekolah swasta dan sekolah negeri tidak terdapat perbedaan dan tetap berdasarkan pada BSNP, meskipun tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah swasta lebih mendorong pada siswa untuk mampu menuntaskan KKM yang telah diterapkan.

2. Discussion

Dalam Implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang bahwa standar yang telah disusun disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pendidikan juga kebutuhan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Hasil analisis penelitian masih ditemukan berbagai kendala pencapaian serta temuan-temuan yang menjadikan standar nasional pendidikan belum sepenuhnya dapat dicapai.

Berdasarkan hasil analisis data dan dokumen penelitian ditemukan bahwa pencapaian pemenuhan SNP banyak terkendala pada standar kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan. Hasil temua peneliti terdapat empat standar yang masih sangat rendah yaitu standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Beberapa permasalahan pencapaian standar kompetensi lulusan, terutama pada pengalaman pembelajaran. Pada tingkat SD misalnya pengalaman belajar seni budaya lokal, komunikasi lisan maupun tulisan, serta keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung masih rendah.

Persoalan kedua terkait dengan persoalan pencapaian standar sarana dan prasarana. Pada standar sarana dan prasarana, satuan pendidikan banyak yang terkendala masalah izin mendirikan bangunan, kepemilikan laboratorium yang belum sesuai, tempat ibadah yang belum sesuai, serta keberadaan UKS, gudang, serta ruang sikulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bukan hanya itu, tidak sedikit juga ditemukan bangunan sekolah yang tidak layak.

Persoalan ketiga adalah persoalan standar pendidik dan tenaga kependidikan yaitu rendahnya penguasaan mata pelajaran oleh guru, kualifikasi akademik tenaga kependidikan yang masih rendah dan belum sesuai. Padahal guru sebagai sebuah profesi memerlukan kemampuan/intelektual khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki keterampilan atau keahlian mengembangkan potensi peserta didik. Fakta lain menyebutkan bahwa mutu guru menjadi kendala terbesar dalam melaksanakan kurikulum pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambaran bahwa mutu guru masih jauh memadai untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan pesatnya perkembangan zaman. Jika guru memiliki kualitas sebagai guru profesional, maka tuntutan kurikulum apapun dapat dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu upaya yang keras untuk menyelesaikan persoalan delapan standar nasional pendidikan, terutama pada standar yang masih ditemukan banyak masalah antara lain kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan. Rendahnya pencapaian SNP pada komponen yang masih rendah perlu mendapat perhatian agar mutu pendidikan dapat dicapai secara utuh.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bahwa dalam pelaksanaan pencapaian 8 standar nasional pendidikan masih

menghadapi berbagai permasalahan terutama pada komponen standar kompetensi lulusan yang masih belum sesuai kebutuhan masyarakat. Standar kedua masih banyak ditemukan masalah adalah pada sarana dan prasarana dimana tidak sedikit juga ditemukan bangunan sekolah yang tidak layak. Rendahnya mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta tidak sesuainya kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi masalah yang perlu menjadi bagian penting untuk dituntaskan. Rendahnya sistem manajemen mutu kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan serta belum optimalnya kemampuan kepala sekolah di satuan pendidikan dalam menggali kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan.

2. Hambatan Implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masih lemahnya komitmen Dinas Pendidikan dalam pengelolaan :
 - 1) Beban biaya operasional apabila harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan sulit untuk melakukan inovasi;
 - 2) Penambahan ruang kelas dan laboratorium praktik membutuhkan dukungan dana pendidikan sehingga tidak cukup mengandalkan biaya operasional sekolah (BOS);
 - 3) Adanya biaya operasional non personal yang tidak mungkin dibiayai oleh anggaran yang ada;
 - 5) Adanya ketidaksinkronan penggunaan anggaran dari APBD dan BOS;
 - 6) Belum tercukupinya beban biaya non personal yang besar karena keterbatasan sumber keuangan sekolah baik yang bersumber dari APBN/APBD maupun masyarakat;
 - 7) Daftar penerima subsidi silang seringkali bertambah sehingga pengalokasian dana berubah sesuai dengan kecukupan dana yang bersumber dari pemerintah.
3. Solusi untuk mengatasi hambatan yaitu Implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yaitu:
 - 1) Upaya pencapaian standar nasional pendidikan perlu ada pembinaan sekolah dan kepala sekolah secara berkelanjutan dengan mengacu pada capaian sebelumnya dengan peta akreditasi sekolah. Hasil akreditasi memetakan bagian yang masih perlu mendapat perhatian serius, perlu diprioritaskan sehingga lahir sebuah program yang berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan;
 - 2) Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan perlu diklasifikasikan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Pada tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah bertanggungjawab terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan. Untuk pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan adalah pihak pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui kebijakan pembiayaan pendidikan;
 - 3) Perlu pelibatan semua komponen sekolah antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan untuk mengidentifikasi kelemahan kelemahan agar menjadi kekuatan dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

ACKNOWLEDGEMENTS

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang agar pemerintah sebagai pemegang kebijakan dapat meningkatkan upaya dalam pencapaian 8 standar nasional pendidikan terutama komponen standar yang masih perlu mendapat perhatian secara bertahap maupun serentak disesuaikan dengan kondisi yang paling memungkinkan.
2. Pada tingkat satuan pendidikan standar yang dirasakan sulit dipenuhi yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan. Belum semua standar bisa dicapai oleh sekolah negeri.
3. Solusi untuk mengatasi hambatan implementasi perencanaan kualitas pendidikan dan produktivitas kerja dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yaitu pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan, dapat meningkatkan upaya dalam pencapaian standar nasional pendidikan terutama pada komponen standar yang masih perlu mendapat perhatian secara bertahap maupun serentak disesuaikan dengan kondisi yang paling memungkinkan.

REFERENCES

Buku

Apandi. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.

- Burhanudin Yusuf. 2019. "Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah," Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Busro, Muhammad. 2018. Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prnadameidia Group.
- Dikdik Suhardi. 2018. Materi Pendukung Literasi Digital di Sekolah Menengah Atas. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Edy Sutrisno. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana .
- Elbandiansyah. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kesatu. Malang: IRDH
- Fachrurazi, dkk. 2021. Dara Manajemen Bisnis. Cetakan Pertama. November 2021. Bandung: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri
- Fauzi Akhmad, Rusdi Hidayat Nugroho A. 2020. Manajemen Kinerja. Surabaya: Airlangga University Press
- Firmansyah. 2018. Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran). Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hery. 2019. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Grasindo
- Ismi. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan 9. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ketut Bali Sastrawan. 2019. Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Perencanaan Mutu Strategis. Kemdikbud.go.id.
- Made Pidarta. 2015. Landasan Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manap Somantri. 2014. Perencanaan pendidikan. Sumbawa Barat: PT. IPB Press.
- Mangkunegara Anwar Prabu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nanang Tegar. 2019. Manajemen SDM dan Karyawan (Strategi Pengelolaan SDM dan Karyawan dengan Pendekatan Teoritis dan Praktis), Yogyakarta: Quadrant
- Nur Aedi. 2015. Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Cetakan Kedua. November 2015. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Rokhmani. 2017. Intensitas dan variasi morfometrik *Trichodina sp.* pada benih ikan gurami (*Osphronemus gouramy Lacepede*) pendederan i yang dijual di pasar ikan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara. *Majalah Ilmiah Biologi BIOSFERA: A Scientific Journal* 33 (3), 134-141
- Rr Vemmi Kesuma Dewi, dkk. 2021. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Indosurya Kencana Bekasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia. JENIUS. Vol.4 No.2 Januari 2021.*
- Sarinah, Mardalena. 2017. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Said, Achmad Kabiru. 2017. Manajemen dan Teori Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja. PT Refika Aditama. Bandung
- Sinaga, Adelia W.S., Nasution H.. 2020. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Analysis of Mathematical Problem Solving Ability of Students Viewed from Creative Thinking Stages in Problem-Based Learning Model. International Electronic of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), 496–502
- Sinabela Lijan Poltak. 2019. Manajemen Kinerja. Pengelolaan, Pengukuran dan Implikasi Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumual Tinneke Evie Meggy. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Surabaya: CV R.A.De.Rozarie.
- Sutrisno Hadi. 2017. Metodologi Rised. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2019. Statistik Ed Revisi/ Sutrisno Hadi (Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2020. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal/Disertasi/Tesis

- Hiyasintus Ile Wulogening, Agus Timan. (2020). Implementasi Total Quality Mangement (TQM) dalam Sistem Manajemen Perencanaan Kepala Sekolah. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 8 No.2 September 2020 (137-146)
- Meila Hayudiyani, Ahmad Supriyanto, Agus Timan. (2020). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Pengembangan Budaya Lokal. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* Vol. 3 No. 1 maret 2020, Hal 102-109. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/> ISSN 2615-8574 (online). Program Studi Pascasarjana
- Moh. Nahrowi (2019). Manajemen Mutu Sekolah Dasar. *Jurnal Auladuna* Vol. 01 No.01 April 2019

Rahman Tanjung, Yuli Supriani, Annisa Mayasari. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Siti Masitoh. (2017). Manajemen Pengendalian Mutu Pendidik di Madrasah. Jurnal Islamic Education Manajemen 2(2) (2017) 16-32 <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema>

Dokumen

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/H/AK/2017 Tanggal 10 Maret 2017
5. Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
6. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2020
7. RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131555/perda-kab-sumedang-no-5-tahun-2019> diakses pada tanggal 10 September 2022
8. LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2021
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah